

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bagian yang mengalami perubahan mendasar dengan ditetapkannya UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua Undang-Undang tersebut telah memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah. Kewenangan dimaksud diantaranya adalah keleluasaan dalam mobilisasi sumber dana, menentukan arah, tujuan dan target penggunaan anggaran.

Seiring dengan reformasi, maka perlu dilakukan perubahan-perubahan di berbagai bidang untuk mendukung agar reformasi dapat berjalan dengan baik, diantaranya adalah perubahan di bidang penatausahaan dan akuntansi keuangan daerah karena melalui proses penatausahaan dan akuntansi keuangan daerah dihasilkan informasi keuangan yang tersedia bagi berbagai pihak untuk digunakan sesuai dengan tujuan masing-masing.

Dalam penatausahaan dan akuntansi keuangan daerah, secara rinci sistem dan prosedur ditetapkan oleh masing-masing daerah. Perbedaan dimungkinkan terjadi sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah. Dengan upaya tersebut, diharapkan daerah didorong untuk lebih tanggap, kreatif dan mampu mengambil inisiatif dalam perbaikan dan pembaharuan dalam sistem dan prosedurnya serta meninjau kembali sistem tersebut secara terus-menerus berdasarkan keadaan, kebutuhan dan kemampuan setempat. Dalam penatausahaan dan akuntansi keuangan daerah, pemerintah daerah dapat menggunakan sistem yang disarankan oleh pemerintah sesuai kebutuhan dan kondisinya, dengan tetap memperhatikan standar dan pedoman yang ditetapkan.

Di samping itu, dalam pelaksanaan desentralisasi kewenangan pemerintahan kepala daerah, aparatur dan masyarakat berkewajiban untuk tetap menjaga kesatuan bangsa, dan harus melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggungjawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan

pembangunan. Oleh sebab itu, untuk mengelola keuangan yang baik maka dibutuhkan pemahaman dan praktek yang baik dalam melaksanakan peraturan yang berlaku.

Pada era reformasi, pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja menjadi perhatian utama bagi para pengambil keputusan di pemerintahan. Perubahan – perubahan penting dan mendasar telah dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mengakomodasi berbagai tuntutan dan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Ketersediaan anggaran pemerintah yang sangat terbatas dan masih harus diprioritaskan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang harus segera diselesaikan, maka pengalokasian anggaran harus dilakukan secara hati-hati dan bertanggungjawab agar anggaran yang terbatas itu dapat dimanfaatkan secara efisien dan dapat menghasilkan daya ungkit yang kuat bagi pembentukan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan demikian diperlukan siklus perencanaan, pengalokasian, pemanfaatan, dan pengevaluasian anggaran pengembangan pemerintahan yang baik sehingga pelaksanaan strategi untuk pencapaian tujuan dapat berjalan secara efektif.

Tuntutan transparansi dalam sistem Pemerintah semakin meningkat pada era globalisasi ini, tidak terkecuali transparansi dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun laporan pertanggungjawaban yang menggunakan sistem akuntansi yang diatur oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang bersifat mengikat seluruh Pemerintah Daerah. Sebagai upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara atau Daerah adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan dapat diandalkan serta disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah diterima secara umum. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kesenjangan yang lebar antara kebutuhan anggaran dengan keterbatasan anggaran yang dapat disediakan akan menimbulkan pengalokasian anggaran yang buruk apabila arah dan prioritas penggunaan anggaran tidak terdefinisi dengan baik, proses pengalokasian anggaran tidak sistematis, dan praktik penganggaran yang tidak transparan karena lemahnya persyaratan kelayakan pembiayaan. Untuk menghindari pemborosan anggaran, perlu dikembangkan kerangka perencanaan dan pengalokasian anggaran. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara memuat berbagai perubahan mendasar dalam pendekatan penyusunan anggaran. Perubahan mendasar tersebut meliputi aspek-aspek penerapan pendekatan penganggaran dengan perspektif jangka menengah (*Medium Term Expenditure Framework*), penerapan penganggaran secara terpadu (*Unified Budget*) dan penerapan penganggaran berbasis kinerja (*Performance Budget*).

Dalam pengelolaan anggaran, pada tahap perencanaan pemerintah daerah sebagai mitra untuk merumuskan suatu kebijakan mengenai rencana anggaran pendapatan dan belanja, kemudian setelah rencana anggaran tersebut disahkan menjadi Anggaran Pendapatan Belanja Negara / Daerah (APBN/APBD), pemerintah yang akan melaksanakan pengelolaan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara / Daerah (APBN/APBD). Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik diperlukan pengelolaan anggaran yang baik (*good governance*) untuk kesejahteraan rakyat. Dalam Tugas Akhir ini, penulis mengambil judul “**PENGELOLAAN ANGGARAN PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH**”.

1.2 Ruang Lingkup

Setiap pembahasan masalah dalam suatu penyusunan laporan tugas akhir mempunyai suatu tujuan tertentu yang perlu dicapai. Oleh karena itu, perlu adanya ruang lingkup pembahasan masalah yang diuraikan secara lebih spesifik dan tidak menyimpang dari judul yang telah ditentukan. Sehingga nantinya setiap pembahasan yang ada dapat mudah dipahami oleh pembaca. Dalam Laporan ini, ruang lingkup pembahasan adalah :

1. Perencanaan Anggaran.
2. Proses Pengajuan Anggaran.
3. Realisasi Anggaran.

Dari ketiga tugas yang dijalankan Sub Bagian Perencanaan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, hanya akan dibahas tugas yang pertama dan kedua, yaitu perencanaan anggaran dan proses pengajuan anggaran. Khususnya pada Pengelolaan Anggaran Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui pengertian dan klasifikasi anggaran yang jelas.
2. Untuk Mengetahui proses penyusunan anggaran daerah pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah.

1.3.2 Kegunaan Penulisan

Kegunaan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah :

1. Bagi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah
 1. Hasil simpulan dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan bagi Staf Karyawan mengenai penyusunan anggaran.
 2. Dapat membantu Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam pengelolaan anggaran.
2. Bagi Akademik
 1. Sebagai referensi dan tambahan inventaris bagi perpustakaan Universitas Diponegoro Semarang.
 2. Sebagai informasi bagi pembaca dan khususnya mahasiswa yang akan menyusun Tugas Akhir.

3. Bagi Penulis

1. Sebagai sarana untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh penulis selama dibangku perkuliahan pada dunia kerja.
2. Untuk menambah pengalaman dan wawasan mengenai dunia kerja.
3. Untuk menambah pengetahuan mengenai pengelolaan anggaran.

1.4 Cara Mengumpulkan Data

1.4.1 Data Penelitian

Untuk pengumpulan data dan informasi dalam menyusun Laporan Tugas Akhir ini digunakan metode-metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Data tersebut menjadi data sekunder kalau dipergunakan oleh orang yang tidak berhubungan langsung dengan penelitian yang bersangkutan (Marzuki, 2005:60). Data primer yang digunakan dalam laporan ini diperoleh dari hasil wawancara beberapa karyawan atau staff Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah.

Contoh dari data primer ini adalah wawancara di sini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi yang mendalam dari narasumber tentang dasar pengelolaan anggaran Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah.

2. Data sekunder

Data Sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, misal dokumen-dokumen Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan atau organisasi, surat kabar dan majalah, ataupun publikasi lainnya (Marzuki, 2005:60). Data sekunder yang diperoleh penulis berasal dari referensi yang ada di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah yang berupa landasan teori.

Contoh dari data sekunder adalah studi kepustakaan, studi dokumenter, dan perundang-undangan yang ada hubungan dengan masalah yang diteliti.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data dan informasi dalam menyusun Laporan Tugas Akhir ini digunakan metode-metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Metode Observasi

Menurut Nawawi dan Martini (1991) observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian. Kelebihan dari metode observasi yaitu data yang diperoleh lebih akurat dan keabsahan alat ukur dapat diketahui secara langsung. Pengumpulan data melalui observasi dapat dilakukan dengan mengamati secara langsung kegiatan pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah.

2. Metode Wawancara

Menurut Prabowo (1996) wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang responden, caranya adalah dengan bercakap-cakap secara tatap muka. Pada penelitian ini wawancara akan dilakukan dengan memberi pertanyaan kepada Kasubbag secara langsung mengenai pengelolaan anggaran.

3. Studi Pustaka

Menurut Nazir (1988) studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur, catatan, dan laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran tentang permasalahan yang akan dibahas secara keseluruhan, maka diperlukan suatu sistematika pembahasan. Adapun sistematika pembahasan Laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

PENDAHULUAN

BAB I Memaparkan latar belakang masalah yang menyebabkan mengapa masalah ini dipilih, ruang lingkup penulisan, tujuan dan kegunaan penulisan, tempat dan pelaksanaan cara mengumpulkan data yang dikerjakan, serta sistematika penulisan laporan.

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

BAB II Mendeskripsikan tentang gambaran umum perusahaan yaitu mengenai sejarah singkat berdirinya Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, Visi dan Misi, Struktur Organisasi, Tugas Fungsi Pokok Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah.

PEMBAHASAN

BAB III Dalam bab ini diuraikan mengenai ruang lingkup penulisan yang telah disampaikan yaitu perencanaan anggaran dan proses pengajuan anggaran Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah.

PENUTUP

BAB IV Meliputi simpulan dari uraian yang telah dijabarkan dalam pembahasan tugas akhir serta saran yang dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.